

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyak sekali permasalahan ekonomi baik dari segi mikro maupun makro. Menurut Jannah & Nasir (2018) “Salah satu masalah ekonomi makro yang terjadi di Indonesia adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana perekonomian negara yang menunjukkan mengenai sejauh mana keadaan ekonomi untuk dapat menuju pada keadaan yang lebih baik.” Oleh karena itu menurut Billah & Wijaya (2022) “Diperlukan adanya tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang membaik melalui pembangunan ekonomi pada suatu daerah karena kegiatan perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi daerah pada suatu periode.”

Sejak munculnya pandemi COVID-19 yang diumumkan oleh WHO pada tahun 2020, hal ini tentu menimbulkan banyak sekali perubahan pada keadaan ekonomi Indonesia yang memburuk, termasuk pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun. Dampak dari munculnya pandemi COVID-19 ini sangat merugikan berbagai lapisan masyarakat. Menurut Ahmad (2022) “Dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi sangat lemah” berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 5,02% namun sejak adanya pandemi di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 2,97%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti diberlakukannya PSBB, melemahnya

daya konsumtif masyarakat, dan terjadinya PHK besar-besaran karena perusahaan mengalami kerugian.

Memajukan suatu daerah tentunya merupakan tujuan yang ingin di capai oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam memajukan suatu daerah, pemerintah daerah di harapkan dapat berperan dalam mencapai tujuan utama dalam pembangunan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan didasarkan pada adanya prinsip bahwa pemerintah daerah lah yang mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah harus mempertimbangkan besarnya sumber penerimaan daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi sekaligus pertumbuhan dalam membangun daerah, meminimalisir kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu substansi yang ada pada otonomi daerah adalah desentralisasi yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pengertian desentralisasi menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah “Penyerahan dalam urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, berdasarkan asas otonomi, yang artinya desentralisasi merupakan pendistribusian sumber daya dari pusat ke daerah.”

Putrayuda et al. (2017) menyatakan bahwa “Perubahan pengelolaan keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan pemerintahan daerah berubah menjadi daerah otonom.” Hal ini tentu mempengaruhi terjadinya desentralisasi

fiskal dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam menggali hasil pendapatan daerah serta mengalokasikan secara mandiri untuk keperluan pembangunan melalui desentralisasi fiskal. Qwanthala et al. (2022) menyatakan bahwa “dengan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di berbagai bidang khususnya bidang sektor publik.” Menurut Kusumawati & Wiksuana (2018) Desentralisasi fiskal memiliki fungsi yaitu dapat meningkatkan efisiensi sektor publik dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Saraswati (2017) mengungkapkan bahwa “Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dipakai dalam mengukur kesuksesan dalam memajukan dan membangun perekonomian serta masalah perekonomian pada waktu jangka panjang di dalam suatu daerah.” Menurut Talangamin et al. (2019) “Pertumbuhan ekonomi menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang di hasilkan oleh masyarakat melalui perkembangan aktivitas ekonomi yang meningkat.” Mokorowu et al. (2020) menyatakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat membantu meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat, dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam aspek pembangunan.” Menurut Setyanto (2021) “Kemandirian daerah diperkecil dari seberapa besar porsi kontribusi masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau PDRB. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah yang mengalami peningkatan akan berakibat terhadap pendapatan perkapita penduduk yang juga ikut meningkat, sehingga juga akan memicu meningkatnya tingkat konsumsi dan produktivitas masyarakat.”

Pada tabel 1.1 dibawah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada saat muncul nya pandemi covid 19 pada awal tahun 2020

menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menurun sangat drastis dengan presentase menjadi -5,31%. Namun pada tahun ke dua dari adanya pandemi ini Provinsi Jawa Timur dapat menaikkan kembali presentase pertumbuhan ekonominya menjadi 2,34%. Perubahan ini bisa di simpulkan bahwa pandemi covid sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia termasuk juga pada Provinsi Jawa Timur yang menyebabkan presentase nya sangat turun hingga di angka minus.

Tabel 1.1 PDRB atas Harga Konstan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-5,31%
2021	2,34%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2021)

Menurut Safitri et al. (2021) “Salah satu strategi untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu perlu adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dengan menerapkan prinsip *value for money* yaitu dengan pengalokasian belanja modal yang tepat.” Beberapa manfaatnya bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan lebih berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Sulaeman & Silvia (2019) menjelaskan “Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian di daerah sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan

ekonomi secara nasional. Belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah dari APBD dengan tujuan menambah aset tetap.”

Siswiyanti (2017) menjelaskan “Laju perekonomian suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, maka secara tidak langsung pembangunan infrastruktur ini mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.” Menurut Suryanishanti & Witono (2022), “Dari segi manfaat, pemerintah daerah harus dapat dengan baik dalam pengalokasian belanja modal, karena belanja modal merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun jika dilihat dari segi manfaat, alokasi anggaran belanja modal sangat menguntungkan dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.” Ellendythia et al. (2017) “Dalam rangka memperbaiki pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan aset tetap berupa fasilitas sarana dan prasarana yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pengembangan dan penambahan aset tetap diperoleh melalui alokasi belanja modal.”

Namun pada kenyataannya pemerintah lebih mengutamakan untuk mengalokasikan belanja daerah ke dalam belanja operasi yang kurang memiliki dampak terhadap kualitas peningkatan layanan publik. Penggunaan belanja daerah secara langsung yang meliputi belanja modal pada tahun 2020 sebesar 11,80% dan pada tahun 2021 hanya sebesar 11,74% dari total anggaran belanja daerah. Dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal setiap tahun semakin sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah masih belum bijak dalam penentuan alokasi belanja daerah yang khususnya lebih banyak untuk belanja modal. Maka dari itu, dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah belum dapat terwujud dikarenakan pemerintah daerah masih belum memaksimalkan

penggunaan dana untuk pembangunan ekonomi daerah khususnya untuk belanja modal daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan menggunakan pendapatan daerah yang mencakup PAD, DAU, dan DAK. Menurut A. S. Putri et al (2021) "PAD memiliki peran sebagai sumber pendapatan dalam menunjang pembangunan daerah, PAD juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah terhadap sumber daya yang tersedia pada suatu daerah." PAD bukan satu-satunya aspek yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, DAU dan DAK juga memiliki peran dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN kemudian dialokasikan sebagai pemerataan keuangan antar daerah dalam pembiayaan keperluan pengeluaran daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.

Selain DAU, DAK juga tentu memiliki manfaat guna pembangunan daerah. Menurut Muda & Ridha (2018) "DAK merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara pusat dan daerah, dimana DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN kemudian ditransfer kepada daerah sehingga dapat mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional." Sulit bagi pemerintah daerah untuk bisa mendongkrak perekonomian daerah di masa pandemi COVID-19. Berikut adalah tabel mengenai perkembangan PAD, DAU, dan DAK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.

Tabel 1.2 Jumlah anggaran PAD, DAU, dan DAK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020-2021

Tahun	PAD (Milyar Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	DAK (Milyar Rupiah)
2020	19.830,28	34.199,72	10.637,80
2021	22.006,53	33.824,68	11.016,17

Sumber: djpk. Kemenkeu

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk PAD tahun 2020 sebesar 19.830,28M, tetapi pada tahun 2021 pendapatan naik menjadi 22.006,53M. Sedangkan untuk dana alokasi umum (DAU) tahun 2020 sebesar 34.199,72M dan tahun 2021 menurun hanya sebesar 33.824,68M. Kemudian untuk dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020 sebesar 10.637,80M dan tahun 2021 mengalami peningkatan anggaran yaitu sebesar 11.016,17M.

Penelitian ini mengacu pada jurnal yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Maheni & Maryono (2021)(Harahap et al., 2019)(Harahap et al., 2019)(Harahap et al., 2019) yang berjudul “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel inetrvening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2019”. Kemudian pembaruan yang dilakukan pada penelitian ini dari jurnal tersebut adalah mengubah periode tahun yang dimana jurnal yang dijadikan rujukan menggunakan tahun 2017 sampai 2019 dimana tahun tersebut sebelum terjadinya pandemi COVID-19, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun masa pandemi COVID-19 terjadi yaitu tahun 2020 sampai 2021, karena didasarkan pada data yang dilihat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan presentase pertumbuhan ekonomi hingga di angka minus, peneliti meyakini bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan memburuknya tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian, dimana pada jurnal melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Alasan peneliti memilih Kabupaten/Kota Provinsi

Jawa Timur sebagai objek penelitian karena setelah dua tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia yaitu pada tahun 2020 dan 2021, pemulihan ekonomi di Pulau Jawa semakin pesat meski dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,74 persen; diikuti Banten sebesar 5,70 persen; Jawa Barat sebesar 5,68 persen; Jawa Tengah sebesar 5,66 persen; DKI Jakarta sebesar 5,59 persen; dan terakhir DI Yogyakarta sebesar 5,20 persen.

Dilansir dari www.dpr.go.id, Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyatakan bahwa “Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu barometer penyaluran program Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang menurun akibat dampak dari pandemi COVID-19”, maka diperlukan adanya pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni berupa PAD, DAU, dan DAK. Dimana pendapatan daerah tersebut nantinya akan dialokasikan dalam belanja daerah dan lebih difokuskan pada alokasi belanja modal sehingga dapat berkontribusi dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur melalui perkembangan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening” (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?
5. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?
6. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?
7. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?
8. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?
9. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?

10. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pembatasan dalam penelitian ini pada aspek data dimana dibatasi pada laporan Produk Domestik Regional Bruto, yang mempunyai keterkaitan dengan nilai dari realisasi PAD, DAU dan DAK serta Belanja Modal yang terdapat pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2021.
2. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti investasi, ekspor, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan angkatan kerja.
3. Pertumbuhan ekonomi di hitung atau di ukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.

5. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.
6. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.
7. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.
8. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.
9. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.
10. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan ini, penulis memiliki harapan agar penelitian ini memiliki manfaat dan berguna bagi pembaca dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan di bidang keilmuan akuntansi, khususnya dalam hal pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menginformasikan dimana penting sekali untuk

pemerintah daerah melakukan optimalisasi pada sumber daya yang terdapat pada daerah guna memperbaiki kualitas dari fasilitas pelayanan publik demi perkembangan kemajuan daerah.

- b. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa tulisan ini dapat digunakan menjadi bahan referensi sekaligus data tambahan yang bermanfaat bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan atau sedang mengkaji penelitian yang serupa.

1.5.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini secara empiris dapat membantu dalam memahami pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Berdasarkan manfaat kebijakan tersebut, dengan adanya penelitian ini penulis memiliki harapan agar dapat ikut memberi kontribusi sebagai salah satu dasar dalam menetapkan kebijakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.